

## **BAB. IV**

### **HEGEMONI PENGUSAHA SEBAGAI MEKANISME REPRODUKSI**

#### **KEKUASAAN SOESILO BAMBANG YUDHOYONO PERSPEKTIF**

##### **PEMIKIRAN ANTONIO GRAMSCI**

Hegemoni merupakan dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lainnya yang sejajar maupun dibawahnya. Sebagaimana pada BAB sebelumnya Antonio Gramsci menggambarkan terkait dengan defenisi hegemoni. Bagi Gramsci, hegemoni dalam pelaksanaannya melibatkan sentuhan dari praktek perpektif ganda dalam tindakan politik, misalnya kekuatan dan konsensus, otoritas dan hemononi, serta kekerasan dan kesopanan. di samping itu, konsep populer dari Gramsci ini dipergunakan untuk menganalisa praktek kekuasaan di Indonesia pada rezim Sosilo Bambang Yudhono (SBY).

Oligarki ekonomi dan kekuasaan politik SBY bukan diperoleh dari kekerasan melainkan dengan menggunakan persetujuan kepemimpinan dan ideologi. Pemegang kekuatan ekonomi dengan kata lain adalah pengusaha yang teritergral dengan kekuatan negara berdasarkan kepemimpinan SBY, sehingga hegemoni terbentuk dengan organisasi konsesus dalam perumusan kebijakan yang saling menguntungkan antara pengusaha - penguasa.

##### **A. Pola Ekonomi - Korporasi kekuasaan SBY**

Gramsci memberikan sumbangan devinisi terkait marxis klasik yang lahirnya konsep kelas. Sumbangan yang nyata analisisnya mengenai hubungan kekuatan politik. Ia mengambil contoh dalam lahirnya kapitalis,

dan membedakan tiga *fase* perkembangan kesadaran politik kolektif dan organisasi. Dua *fase* yang pertama adalah ekonomi-korporatif (sering disingkat dengan korporasi) sedangkan ketiga adalah fase hegemoni.

Pejelasan kelas marxis klasik dari fase – fase Gamsci diantaranya :

*Fase pertama* ; ini merupakan yang paling awal terjadi ketika pedagang perlu sejajar dengan lain, seorang pengusaha dengan penguasa lainnya. Namun disini pedagang belum merasakan timbulnya solidaritas dari pengusaha. Anggota kelompok proposional sadar akan kepentingan bersama mereka dan perlunya mereka bersatu, namun mereka belum menyadari kebutuhan untuk bergabung kelompok lain ke dalam kelompok yang sama.

*Fase kedua* ; fase ini dimana telah tumbuh kesadaran akan kepentingan bersama semua kelas, namun masih dalam bidang ekonomi. Pada tahapan ini masalah negara sudah diperhatikan, namun hanya sebatas hukum dengan kelompok yang berkuasa: ‘ hak untuk serta dalam penetapan undang – undang dan administrasi, bahkan untuk mengubah memang diakui , namun harus tetap berada dalam stuktur dasar yang ada.’ Dan *fase ketiga* ; adalah fase hegemoni, “di mana orang menjadi sadar bahwa kepentingan perusahaannya, dalam perkembangan masa sekarang dan mendatang, melampaui batas – batas korporasi kelas yang bersifat murni ekonomi, dan kepentingan itu dapat dan harus menjadi kepentingan dari kelompok yang lebih rendah’. Ini adalah tahap murni politik. Ini adalah fase di mana ideologi – ideologi yang sebelumnya terpecah – pecah sekarang bersaing sampai salah satunya, atau gabungan dari ideologi – ideologi itu, memang bisa

menyatukan tujuan – tujuan ekonomi, politik, intelektual dan moral dan serta ‘mampu menghadapi semua persoalan sehingga perjuangan tidak berlangsung dalam dataran korporasi namun dalam dataran ‘universal’, yang pada akhirnya terciptalah hegemoni suatu kelompok sosial yang kaut terhadap kelompok lain yang lebih rendah. Hal ini mengingatkan bagi kabinet Indonesia bersatu jilid II yang terdiri dari gabungan dari partai kualisi yang disebut sebagai barisan satu gerbong pemerintahan. Ini dinamakan dengan Sekretariat Gebungan (Setgab) yang sebagai koordinatornya adalah Aburizal Bakrie. Ia adalah seorang politisi merangkap sebagai pengusaha.

Sama halnya, bagi Boedi Sampoerna seorang perngusaha yang berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan pemerintahan yang terlibat dalam kasus Bank Century. Kelompok sampoerna berupaya untuk menjadi perselingkuhan pengusaha-penguasa dalam kekuasaan SBY. Pada awalnya kelompok sampoerna murni berjalan dalam bidang bisnis, namun dalam perkembangan dan melihat dari kepentingan perusahaan. Maka, kelompok sampoerna terlibat dalam aktivitas politik, memberikan dukungan moril dan materi kepada SBY untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan.

Hal ini melatar belakangi Bakrie dan kelompok Sampoerna menjadi sadar akan kepentingan perusahaannya, dalam perkembangan masa sekarang dan mendatang, melampaui batas – batas korporasi kelas yang bersifat murni ekonomi, dan kepentingan itu dapat dan harus menjadi kepentingan dari Group barkie dan Kelompok Sampoerna terhadap kelompok yang lebih

rendah'. Gramsci menegaskan ini adalah tahap murni politik. Yang memperjuangkan dalam bidang membuat regulasi, undang-undang, aturan administrasi, dan bahkan berlindung dibawah kekuasaan untuk kepentingan ekonomi.

Selanjutnya, bukan hanya Group Bakrie dan kelompok Sampoerna saja yang terlibat dalam kekuasaan SBY untuk kepentingan ekonomi disetiap kerajaan bisnis para pengusaha. Namun, hal ini juga terjadi pada sebagian besar pengusaha yang masuk dalam lingkaran kekuasaan SBY, mulai dari hegemoni keluarga SBY yang disebut dengan Istana Cikeas sampai pada hegemoni terluar dari lingkaran kekuasaan SBY yang hanya berkemungkinan berlindung dari acaman hukum di bawah kekuasaan SBY. Mereka ingin setara dan diakui statusnya. Sebagaimana yang tercantum dalam BAB sebelumnya nama-nama pengusaha yang berafiliasi dengan kekuasaan SBY.

#### **B. Mempertahankan Hegemoni Cikeas**

Cikeas menggambarkan suatu kekuasaan yang dikelola oleh SBY. Sebagai corong untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, aditjondro mengistilahkan cikeas adalah kekuatan SBY untuk menguasai istana di dalam bukunya "membongkar Gurita Cikeas". Maka, berbicara terkait dengan kekuasaan SBY tidak terlepas dari kekuatan hegemonik Cikeas. Sebagaimana telah dikatakan oleh Gramsci, bahwa suatu kelompok telah mendapatkan dominan dan mempertahankan dengan gigih kekuasaan yang ada dalam gengamannya, mereka terus 'memimpin'. Hegemoni tidak

pernah dapat begitu saja, tetapi harus diperjuangkan terus menerus. Hal ini menuntut kegigihan untuk mempertahankan dan memperkuat otoritas sosial dari kelas yang berkuasa dalam suatu kelompok masyarakat sipil, dan membuat kompromi-kompromi yang diperlukan untuk menyesuaikan sistem aliansi yang ada dengan kondisi yang senantiasa berubah serta aktifitas kekuatan oposisi.

Kompromi kebijakan dalam kekuasaan SBY diperlihatkan untuk kepentingan para korporasi-kekuasaannya. Misalnya dalam keterlibatan sekretariat Gabungan (Satgab) selalu melakukan perapian barisan dari berbagai kasus, diantaranya; kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Ini mengingatkan pada berita *kompas*, 16 maret 2012, pertemuan Satgab yang berlangsung lebih tiga jam di puri cikeas yang membahas rencana kenaikan harga BBM.<sup>92</sup> Satgab yang merupakan jajaran kabinet selalu melakukan konsolidasi koalisi di Cikeas menggunakan kekuatan Satgab yang dikoordinatori oleh Aburizal Bakrie. Ini tidak terlepas dari kepentingan pengusaha dalam bidang migas dan minyak yang bersifat distributor yang berkompromi dengan kekuasaan SBY.

Di samping itu, satgab bukan hanya dalam bidang menanggapi kenaikan harga BMM namun sebelumnya juga berperan intervensi semu dalam berbagai macam kasus, diantaranya ; kasus Panitia khusus Hak Angket pengusutan kasus Bank Century, sama halnya dalam *reshuffle* kabinet, SBY juga melakukan konsolidasi komitmen dalam koalisi melalui

---

<sup>92</sup> Lihat Koran Kompas, tanggal 16 maret 2012, *Pesan "Drama" dari sekretariat gabungan,*

satgab. Bukan itu saja yang menjadi polemit suara satgab mempengaruhi kinerja DPR di parlemen.

Dalam kasus kenaikan harga BBM, kasus Century, kasus kader partai Demokrat dan kasus yang lainnya yang menggagu stabilitas kekuasaan SBY yang sudah terasah terancam dari kekuatan luar yang memiliki kelompok penekan dan kelompok kepentingan, di DPR maupun di luar gedung senayan. Maka, SBY dan kroni-nya menyusun kembali kekuatan yang ada untuk memperkokoh kembali hegemoninya. Sebagaimana Gramsci menggaris bawahi bahwa, jika krisisnya parah – krisi organik – usahanya tidak hanya cukup berupa mempertahankan semata. Usaha – usaha itu harus mencakup perjuangan menciptakan keseimbangan baru dari berbagai kekuatan politik.

Mempertahankan status cikeas yang dimiliki SBY dengan melakukan hegemoni untuk memproduksi kekuasaan. Hegemoni memiliki deminsi nasional-kerakyatan disamping demensi kelas. Hegemoni memerlukan penyatuan dari berbagai kekuatan sosial yang berada ke dalam sebuah aliasi yang luas mengungkapkan kehendak kolektif semua rakyat. ini mengingatkan kita terkait taufik kimas dalam barisan kekuasaan SBY. Pada BAB sebelumnya dijelaskan bahwa taufik kiemas yang dulunya bagian dari oposisi kekuasaan SBY, namun SBY bisa merangkulnya dengan persuasi dalam kepentingan yang dimiliki taufik kiemas. saat ini taufik kiemas menjabat sebagai ketua MPR-RI. Berdasarkan memberitaan Koran di Australia, bahwa SBY melakukan penyalahan kekuasaan. Kata kuncinya

terjadi kompromi kekuasaan antara kedua tokoh itu. Maka, SBY menggunakan metodeologi hegemoninya dengan melakukan kompromi perwakilan oposisi yang sekiranya akan mengurangi tekanan politik yang dihadapi oleh SBY, maupun sebaliknya taufik kiemas juga akan merasa aman dari persoalan yang dililiti kasus proyek raksasa pada masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri.

Selanjutnya, SBY tetap merangkul kesemua kalangan bukan hanya tokoh politik taufik kiemas bersama oposisi istri dan kelompok lainnya yang sekiranya tidak sepaham dengan kekuasaan SBY. Hal inilah yang disebut Gramsci perang Posisi (*war of position*), SBY strategi membangun suatu kelompok besar yakni istana Cikeas, yang terdiri berbagai kekuatan sosial yang disatukan dengan konsepsi yang sama tentang dunia, kekuatan itu adalah yayasan dan perusahaan, yang didirikan oleh keluarga cikeas maupun yang hanya berafiliasi dengan kekuasaan SBY.

### **C. Pendekatan Struktural Yayasan**

Perang posisi yang berlansung antara dua kelas untuk meraih hegemoni. Gramsci melakukan perbedaan tegas antara strategi yang dilakukan kelas kapitalis dengan strategi yang diterapkan kelas pekerja. Strategi yang diterapkan oleh kaum kapitalis sifat khusus yang dinamakan dengan revolusi pasif (*passive revolution*). Maka, di rezim kekuasaan SBY revolusi pasif juga melibatkan berbagai kelompok sosial, pengusaha, apparatus Negara dan masyarakat sipil. Terutama dalam pembentukan

yayasan dan perusahaan, baik yang didirikan secara tonggak nama keluarga besar cikeas maupun berdasarkan berafiliasi dengan kekuasaan SBY.

Dipaparkan berbagai yayasan yang berafiliasi dengan kekuasaan SBY. Diantaranya *pertama*; Yayasan Majelis Dzikir Nurussalam bukanlah majelis kelas kampung. Majelis ini didirikan oleh Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono dan menjelma menjadi sebuah yayasan. Punya cabang di hampir seluruh provinsi, sejumlah kerabat dan kolega SBY duduk sebagai pengurus yayasan, sementara penyokong dananya adalah sejumlah pengusaha. Tidak ada yang salah dengan keberadaan sebuah Majelis Zikir sebagai wadah untuk mengingat Tuhan, majelis zikir tentulah diharapkan membawa perubahan positif pada perilaku manusia. Mungkin karena itu, Presiden SBY merasa perlu mendirikan majelis zikir, yang dia beri nama Nurussalam atau cahaya keselamatan. Majelis yang didirikan SBY sejak Pemilu Presiden 2004 belakangan dikelola oleh sebuah yayasan tersendiri.

Selama berdiri majelis ini sudah sering menggelar acara zikir bersama di berbagai kota. Di samping Beberapa nama yang mengurus Nurussalam adalah orang-orang yang dikenal baik oleh publik. antara lain tercantum nama SBY dan putranya Eddy Baskoro Yudhoyono; SBY menjadi pembina dan Edhi Baskoro menjabat sebagai sekretaris. Untuk bendahara ada nama Hartanto Eddie Wibowo dan Aziz Mochdar.

Hartanto Edhie Wibowo adalah adik laki-laki dari Ibu Negara Ani Yudhoyono dan seorang pengusaha, yang namanya tercatat sebagai



komisaris pada PT Power Telecom, perusahaan yang dimiliki Keluarga Tjokrosaputro.

Adapun Aziz Mochdar adalah pengusaha atau tepatnya pelaku bisnis dan pernah tercatat sebagai pemegang saham PT Bimantara Citra antara lain di SCTV (dulu), PT Satelindo, PT Duta Nusabina Lestari dan PT Asri Wahana Intinusa. Azis Mochtar merupakan adik dari Muchsin Mochdar. Nama yang disebut terakhir adalah ipar dari B.J. Habibie, Presiden RI ketiga.

Bersama Gunawan Jusuf, Aziz Mochdar merupakan pemilik dari PT Senni Cahaya, sebuah perusahaan patungan yang kepemilikan sahamnya masing-masing dimiliki PT Wibhuti Haemmesyaa (81 persen) and PT Makindo Tbk (19 persen). Sebanyak 98 persen saham Wibhuti dimiliki oleh Aziz Mochdar dan sisanya dikantongi oleh PT Garuda Panca Artha. Adapun saham Garuda Panca Artha, 98 persen dimiliki oleh Rachmini Jusuf, istri Gunawan Jusuf (Makindo).

*Kedua* Yayasan kepedulian sosial puri cikeas didirikan pada tanggal 11 maret 2006 di kompleks perumahan cikeas indah. Yayasan ini juga melibatkan sejumlah menteri sekarang mantan menteri, sejumlah perwira tinggi, sejumlah pengusaha serta anggota keluarga besar SBY.<sup>93</sup> Yayasan ini tidak dipimpin oleh SBY sendiri, tapi oleh orang – orang yang termasuk dalam lingkaran kekuasaannya. Pola memadu kedermawanan dengan dukungan politik dan ekonomi. Mantan perwira tinggi terlibat di yayasan

---

<sup>93</sup> Membongkar gurita cikeas

puri cikeas diantaranya; mantan KSAD Jenderal (Purn.) Subagyo HS, Komjen (Pol) Didi Widayadi, dan Mayjen TNI Bambang Sutedjo. Sedangkan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Pengurus adalah Marsekal Madya (Purn) Suratto Siswodihardjo, mantan Ketua INKOPAU, dan mantan Wakil Ketua MPR-RI Letjen (Purn) Agus Widjojo. Subagyo HS dan Agus Widjojo tetangga SBY di kompleks Cikeas Indah.<sup>94</sup>

*Ketiga*, Yayasan ini juga melibatkan dalam lingkaran kekuasaan SBY, yayasan ini berdiri sebelum pemilu 2009 yang dipimpin oleh Arwin Rasyid. Empat orang dewan Pembina masuk kedalam kabinet Indonesia bersatu (KIB) jilid II, diantaranya adalah Djoko suyanto, purnomo yusgianto, susanto, dan MS Hidayat.<sup>95</sup>

*Keempat*, Yayasan ini dikelola oleh orang – orang yang punya banyak pengalaman di bidang perbankan. Ketua umumnya, arwin rasyit, presiden Direktur CIMB bank niaga, sedangkan bendahara umumnya, Desi netalawaga adalah adik kandung menlu arty natalagawa yang akan diproyeksikan akan diangkat menjadi menlu dalam KBI jilid II.<sup>96</sup>

*Kelima* Yayasan Mutu menikam Nusantara merupakan salah satu yayasan yang berafiliasi dengan kekuasaan SBY. Ketua umumnya adalah Ny. Herawati wirajuda (istri menlu waktu itu).<sup>97</sup> Yayasan yang kontrversi

---

<sup>94</sup> Detiknews, 24 Sept. 2004

<sup>95</sup> Cikeas dan gurita

<sup>96</sup> Grata, 28 oktober 2009

<sup>97</sup> Adjitjocro, *Membongkar Gurita Cikeas* hal, hal 55

dimana bendahara dipegang oleh artalita suriani. Artalita suriani yang lebih akrab dipanggil dengan "ayin". Kedekatan ayin yang tertangkap tangan menyogok jaksa urip tri gunawan.<sup>98</sup>

*Keenam*, Yayasan batik Indonesia yang ikut didukung oleh Ani Yudhoyono dan diketuai oleh Ny. Yultin Ginanjar Kartasmita. Dalam berbagai pameran di dalam dan di luar negeri yang ikut disenggarakan oleh yayasan ini, telah menonjolkan produk perusahaan baru bermerek *Allure*. Gerai perusahaan ini telah dibuka di Indonesia, Singapura, dan Malaysia, sementara beberapa gerai sedang dirintis di London dan Moscow. Batik *allure* telah mengangkat menantu SBY yang pernah dinobatkan menjadi Duta batik Indonesia (Annisa Pohan) dan anaknya (Aira Yudhonoyo) sebagai ikon perusahaan itu.<sup>99</sup>

*Ketujuh*, Yayasan yang didukung oleh Ny. Ani Yudhoyono adalah Yayasan Sulam Indonesia, yang di ketuai Ny. Triana Wacik, istri menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik. Disini ada juga potensi konflik kepentingan antara keluarga Jero Wacik dengan yayasan itu, dan antara keluarga Wacik dengan keluarga Cikeas. Soalnya, PT Puri Ayu, salah satu perusahaan milik Menbudpar yang juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Puri Cikeas, bergerak di bidang desain tekstil. Perusahaan itu berkantor di Bali dan Jakarta.<sup>100</sup>

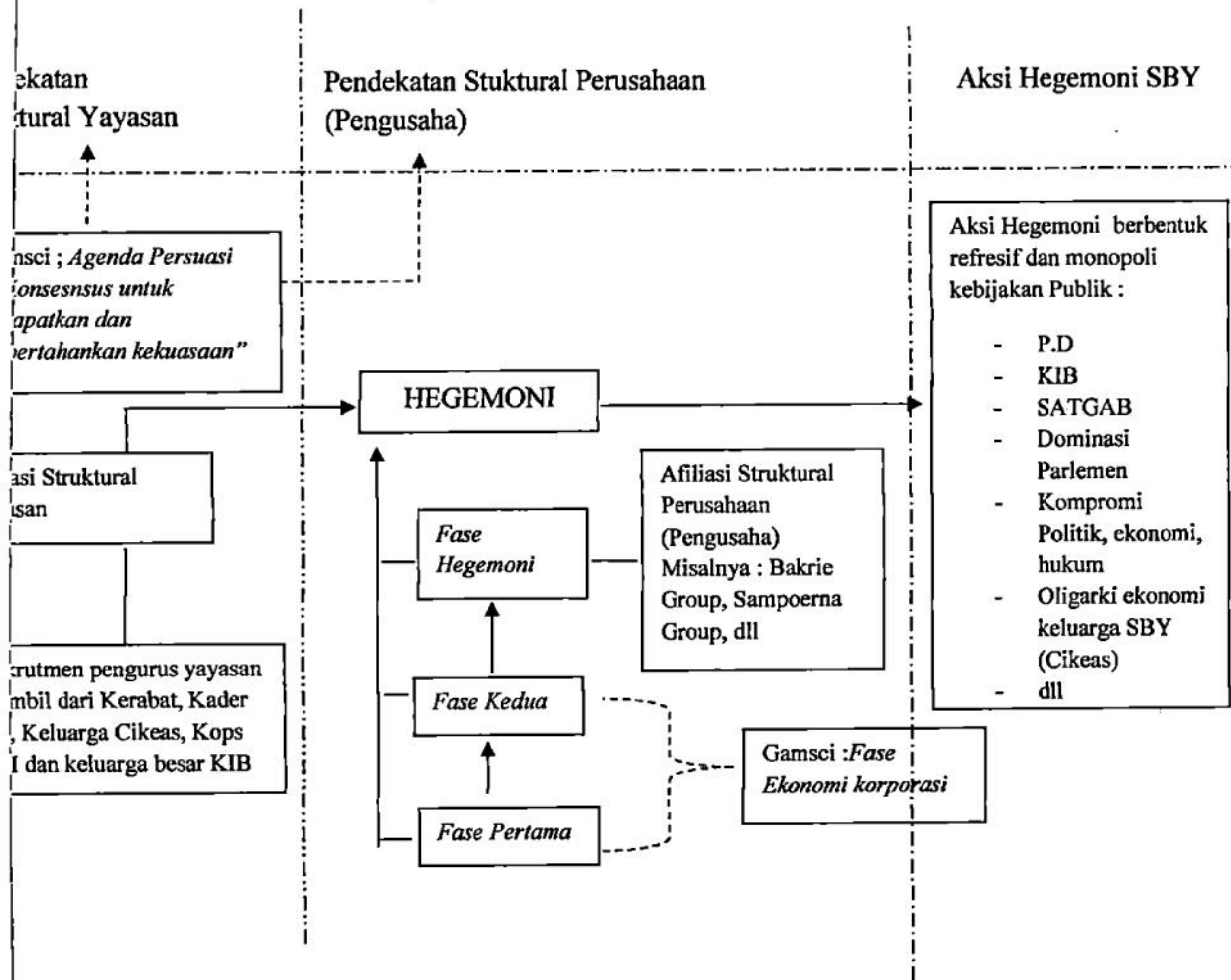
---

<sup>98</sup> Ibit, 56

<sup>99</sup> Ibit, 56

<sup>100</sup> Ibit, 58

**Skema.1.2**  
**Pola Hegemoni Pengusaha-Penguasa dalam kekuasaan SBY persepektif**  
**Analisis Politik Antonio Gramsci**



**ANALISIS DATA :** Hegemoni Pengusaha sebagai reproduksi kekuasaan perspektif pemikiran politik Antonio Gramsci terhadap kekuasaan Soesilo Bambang Yudhoyo